

## ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya merupakan lembaga legiaslatif daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh eksekutif. Salah satu program yang harus mendapatkan pengawasan adalah Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pengawasan DPRK Aceh Jaya yang optimal menjadi fokus dalam penelitian ini agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan dari DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan *civil society*. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK Aceh Jaya, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan data dari media.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Padahal pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut dapat diminimalisir seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota DPRK aktif melakukan pengawasan. Selain itu, anggota DPRK hanya turun ke lapangan pada saat jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan. Tindak lanjut atau rekomendasi kepada dinas terkait hanya sebatas rekomendasi saja. Terakhir, belum ada tim khusus yang dibentuk DPRK Aceh Jaya untuk membahas program listrik gratis secara komprehensif yang sudah berjalan dari 2014-2017.

Faktor yang mempengaruhinya pengawasan DPRK yaitu harmonisasi hubungan eksekutif dan DPRK, tidak semua anggota DPRK bisa menjaga independensinya terhadap eksekutif. Kurangnya pemanfaatan kekuasaan formal yang diberikan kepada DPRK, rendahnya kemauan anggota DPRK untuk turun kelapangan secara langsung untuk melakukan pengecekan terhadap penerima bantuan listrik gratis. Selain itu, lemahnya kinerja pengawasan DPRK disebabkan faktor kurangnya kapasitas teknis DPRK dan kapasitas teknis pendukung DPRK.

Kata Kunci: *Pengawasan, DPRK Aceh Jaya, Listrik Gratis.*

## **Supervision Analysis of Aceh Jaya Regency Representative Assembly Toward Costless Electricity Program**

### **ABSTRACT**

Aceh Jaya Regency Representative Assembly is a regional legislative institution whose function is to supervise the policies or programs implemented by the executive. One program that must be supervised is the Costless Electricity Program for the poor. Since it was implemented in 2014, the program is still found that the beneficiaries are not on target or recipients who are eligible to receive but do not get assistance. Therefore, the optimal control of the Aceh Jaya legislative is the focus of this research so that the policy can run as it should in accordance with applicable regulations. This study uses the qualitative method. Data collection is used by interview, observation and documentation methods. Interviews were conducted with informants from Aceh Jaya regency representative assembly, the regent of Aceh Jaya, the regent's office Aceh Jaya and civil society. Documentation data in this study were from Aceh Jaya regency representative assembly, BPKK, office Aceh Jaya and media.

The results of this study indicate that the implementation of the Aceh Jaya legislative preventive control of Costless Electricity Program has not been optimal. The legislative only carries out supervision on the endorsement and budgeting for this program include in the budgeting. Besides preventive control from the legislative in terms of preventing deviations from the policies that will be realized can be minimized such as the establishment of special team control and formation procedures. Whereas repressive control, institutionally has not been optimal even though the procedures for control have been carried out such as forming teams, going down the field and following up / recommendations. This is because not all legislative members actively supervise. In addition, legislative members only took to the field on the schedule set by chairman. Follow-up or recommendations to related agencies are only limited to recommendations. Finally, there is no special team formed by the Aceh Jaya legislative to discuss a comprehensive free electricity program that has been running since 2014-2017. The factors that influence the legislative oversight are the harmonization of executive and legislative relations, not all members of the legislative can maintain their independence from the executive. The lack of utilization of formal power given to the legislative, the low willingness of legislative members to go down the field directly to check the recipients of free electricity assistance. In addition, the weak performance of the legislative supervision was due to the lack of technical capacity of the legislative and the supporting capacity of the legislative.

*Keywords: Control, Aceh Jaya legislative, Costless Electricity Program*